

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dana Pensiun adalah lembaga yang secara profesional mengelola dana yang dihimpun khususnya dari pekerja/ karyawan untuk dikembangkan, hasilnya menjadi investasi yang diterima setelah masa kerja berakhir. Dana pensiun sebagai bentuk institusi keuangan yang dibentuk oleh berbagai unit kegiatan baik pemerintah maupun swasta, mendapatkan kepercayaan untuk mengelola dana peserta program pensiun. Dana tersebut bersifat jangka panjang karena iuran yang terkumpul dari peserta saat ini baru akan ditarik pada saat peserta pensiun, dengan demikian program dana pensiun memberikan kesinambungan penghasilan kepada para pesertanya dimana kesejahteraan dan pendapatan seseorang telah berstatus terjamin.

Jaminan pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan kesejahteraan pada para karyawan oleh karenanya baik instansi pemerintah maupun swasta selalu dianjurkan untuk mengikut sertakan karyawannya dalam program ini. Diharapkan dengan adanya program jaminan pensiun ini akan memberikan motivasi yang tinggi bagi para karyawan dalam bekerja, di sisi lain akan memberikan keuntungan bagi perusahaan untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dengan demikian akan menguntungkan baik bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan pensiun merupakan bentuk apresiasi dan motivasi untuk para tenaga kerja di seluruh tanah air tanpa terkecuali dan tanpa membedakan ras, suku, gender dan lain-lain (Adesy, 2016).

Dana pensiun mempunyai kekhususan yang berlainan dengan sistem dan prosedur yang biasa diterapkan pada suatu perusahaan karena ditinjau dari misi dan kegiatan usahanya. Informasi keuangan pokok yang perlu disajikan dalam laporan keuangan juga mempunyai kekhususan. Pihak yang paling utama harus dilindungi kepentingannya adalah para peserta program jaminan pensiun yang telah mempercayakan dana hari tuanya kepada BPJS ketenagakerjaan.

Iuran untuk jaminan pensiun dihimpun dari karyawan selama masa kerjanya, yang langsung dipotong dari gaji karyawan setiap bulan. Besarnya iuran yang ditetapkan oleh program jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3% (1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung pengusaha) dan dengan masa iuran selama 15 tahun. Selanjutnya disetorkan pada BPJS ketenagakerjaan. Selain melakukan penghimpunan dana pensiun BPJS ketenagakerjaan juga akan menyalurkan dana pensiun masing-masing peserta program sesuai aturan dan mekanisme yang telah diatur.

BPJS ketenagakerjaan dalam kegiatannya menerima dan menyalurkan dana pensiun dari program jaminan pensiun tersebut tentunya akan melakukan pencatatan dan pelaporan. Pencatatan adalah suatu kegiatan penghimpunan data dengan cara mencatat sehingga mampu memberikan satu kesatuan informasi. Pencatatan itu sendiri sangat penting bagi suatu entitas. Pencatatan merupakan tahap awal dari kegiatan akuntansi dimana seluruh bukti atau transaksi harus dilakukan pencatatan agar menghasilkan informasi yang relevan untuk pengambilan suatu keputusan.

Ikatan akuntansi Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang dana pensiun tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 18 yang terakhir direvisi Tahun 2010. PSAK ini tidak hanya mengatur dana pensiun tapi juga mengatur seluruh entitas yang menyelenggarakan program manfaat purnakarya tersebut termasuk didalamnya entitas BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Pelaporan keuangan dana pensiun diatur dalam PSAK Nomor 18 (revisi 2010) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan tata cara pelaksanaannya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nussy (2014) dengan judul penelitian tentang analisis penerapan PSAK Nomor 18 mengenai akuntansi dana pensiun pada PT Taspen cabang Manado. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dana pensiun Taspen pada tahun 2012-2013, penyajiannya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 18 dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Sehubungan dengan itu, peneliti juga ingin melakukan penelitian yang sama mengenai dana pensiun pada objek yang berbeda yaitu pada BPJS ketenagakerjaan, peneliti ingin mengetahui apakah kegiatan sampai pelaporan keuangan BPJS ketenagakerjaan telah sesuai dengan PSAK Nomor 18 (revisi 2010) yang juga termasuk didalamnya mengenai dana pensiun. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan di Kota Kupang”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun berdasarkan PSAK Nomor 18 (revisi 2010) pada BPJS ketenagakerjaan Kota Kupang.

1.3. Persoalan Penelitian

Bagaimana prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan kota kupang telah sesuai atau belum sesuai dengan PSAK Nomor 18 (revisi 2010)?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui penerapan prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun berdasarkan PSAK Nomor 18 (revisi 2010) pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat penambah wawasan keilmuan khususnya mengenai penerapan akuntansi pada program manfaat purnakarya. Selain itu

sebagai bahan informasi maupun referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang akan melakukan penelitian berikutnya mengenai dana pensiun.

2. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Untuk dapat memahami lebih dalam mengenai prosedur dan pencatatan akuntansi penyaluran dana pensiun dan sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh dengan penerapan di perusahaan.

2) Bagi Mahasiswa

Untuk membantu memberikan gambaran dan pandangan mengenai prosedur dan pencatatan Akuntansi penyaluran dana pensiun.

3) Bagi Universitas

Sebagai bahan bacaan dan menambah referensi bagi pihak yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Prosedur dan Pencatatan Akuntansi Penyaluran Dana Pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang”.